



RENJA PERUBAHAN



DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

● ● ●
2025



KOTA PANGKALPINANG

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang secara substansial menjadi penerjemahan dari visi dan misi Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Mendasari ketentuan Mendasari ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja ini sesungguhnya mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap Kota Pangkalpinang.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan langkah lanjutan untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, juga merupakan integrasi optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global.

Atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pangkalpinang, Juni 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA PANGKALPINANG,

SURANTO, S. Sos., M.M.

Pembina Tk. I/ IVb

NIP. 197701292005011003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Sebelumnya.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.....	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	12
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	19
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	19
3.2. Tujuan dan Sasaran	20
3.3. Program dan Kegiatan	21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	25
BAB V PENUTUP.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.19

Tabel 2.2 11

Tabel 2.3 15

Tabel 3.121

Tabel 3.222

Tabel 4.126



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang pada Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada. Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2023-2026 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2023-2026.

Adapun yang mendasari untuk melakukan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 Tanggal 27 Mei 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 No.277) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesungguhnya Rencana Kerja (Renja) merupakan cerminan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan stakeholders terhadap masyarakat. Rencana Kerja menjadi langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah untuk integrasi dan optimalisasi sumber daya manusia serta sumber dayalain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategislokal, nasional dan global. Rencana Kerja akan menjadi acuan dasar perencanaan, implementasi dan pemantauan gerak langkah pembangunan yang akan menjadi alat pemersatu hati dan gerak laju ke depan, serta menjadi alat koordinasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah dan satuan terkait.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025 merupakan dokumen yang secara substansial Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang. Rencana Kerja (Renja) disusun sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan menjadi masukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Pangkalpinang.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 akan menghasilkan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Perubahan (RKA) Perubahan tahun 2025 sebagai salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan organisasi perangkat daerah dalam upaya untuk mengetahui capaian kinerja yang tercatat dalam perjanjian kinerja sebagai wujud dari kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025 ini akan menjadi pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025, yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tantang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia nomor 6402);
 16. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia nomor 6633);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata Cara Peubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Beritas Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penetapan Standar pelayanan Minimal (Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru;
26. Peraturan daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
27. Peraturan gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencanan pembangunan daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
28. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51).
29. Peraturan Walikota Pangkalpinang No.9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144), Tanggal 15 Maret 2023.
30. Peraturan Walikota Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 Tanggal 27 Mei 2025 Tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 No.277)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- **Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 adalah sebagai pedoman Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 serta mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

- **Tujuan**

1. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Pendapatan dan Belanja Persangkat Daerah;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
5. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, disusun dengan sistematika yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN;

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan.

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta rencana program dan kegiatan 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindaklanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Sebelumnya

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja merupakan bagian dari evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan daerah, yang dilaksanakan dengan menetapkan target capaian kinerja yang akan dicapai sampai dengan tahun 2025. Target capaian kinerja ini merupakan target capaian yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis. Realisasi capaian yang menjadi tolak ukur pada evaluasi ini, diawali dari tahun sebelumnya yang selanjutnya menjadi acuan untuk menentukan target kinerja tahun berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dilakukan setiap tahun untuk memberikan dasar dalam menentukan target kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini sangat penting karena dengan adanya evaluasi pada tahun sebelumnya dapat menjadi koreksi dan panduan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya sehingga penentuan target menjadi lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinag Tahun 2025

TRIWULAN I Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
							I		II		III		IV						
							7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7p	8	9p	10	11	12	13							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1		021601	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	77	4,376,910,368		1,034,562,921		0		0		0	0,000	1034562921,000	0	24 SEKRETARIS DINAS	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	77,96		77,75							77,750		100		SEKRETARIS DINAS	
2		021601202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tembusnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan: %)	100	3,513,479,720	100	972,140,913		0		0		0	100	972140913	100	28 SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN	
3		021601202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/Bulan)	28	3,513,479,720	28	972,140,913						28	972140913	100	28 SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN		
8		021601206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan: %)	100	184,231,400	0			0		0		0		0	0	0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
9		021601206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	2,999,700	0							0		0	0	0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
11		021601206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	24,636,400	0							0		0	0	0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
12		021601206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	2,999,700	0							0		0	0	0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
13		021601206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	360	3,600,000	0							0		0	0	0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
14		021601206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	150,000,000	0							0		0	0	0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
14		021601206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	150,000,000	0							0		0	0	0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
15		021601208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan: %)	100	532,959,440	100	62,422,008		0		0		0	100	62422008	100	12 SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN APLIKASI	
17		021601208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	165,000,000	0							0		0	0	0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
18		021601208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	7,000,000	0							0		0	0	0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
19		021601208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	360,959,440		62,422,008						0		62422008	0	17 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
20		021601209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan: %)	100	146,340,000	100			0		0		0	100	0	100	0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
21		021601209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya (Dengan Satuan:Unit)	3	96,920,000	0							0		0	0	0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
23		021601209010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	47,420,000	0							0		0	0	0 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																49,863	23,637		
PREDIKAT KINERJA																			

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

24	2.1.6.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyediaan informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah. (Dengan Satuan:persen)	100	1,691,740,656	25	344,046,160		0		0		0	25	344,046,160	25	20	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
25	2.1.6.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi Komunikasi (STRAKOM) (Dengan Satuan:%)	100	1,691,740,656	60	344,046,160		0		0		0	60	344,046,160	60	20	SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MEDIA
26		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Dengan Satuan:permohonan)	10	300,960,080	1	47,395,848						#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MEDIA	
27		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi berbasis isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:rekomendasi)	10	54,546,696		4,378,616						0	4378616	0	8	SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MEDIA	
28		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kebutuhan/kelembagaan	140	1,386,213,872	34	292,271,696						34	292271696	340	23	SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MEDIA	
29		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	5	50,000,000		-						0	0	0	0	SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MEDIA	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																25.000	20.337	
PREDIKSI KINERJA																		
30	021603	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:%)	100	3,560,208,896	98	128,308,840		0		0		0	98	128,308,840	98	48	BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT
31	021603201	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:PD/Unit Kerja)	70	45,000,000	68	0		0		0		0	68	0	97	0	SEKSI LAYANAN E-GOVERNMENT
32	021603201002	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	45,000,000	0	0						0	0	0	0	0	SEKSI LAYANAN E-GOVERNMENT
34	021603202	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan E-Government (Administrasi Pemerintahan dan Publik) yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Dengan Satuan:%)	50	3,515,208,896	23	128,308,840		0		0		0	23	128,308,840	46	4	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI
35		Facilitasi penyelenggaraan SPEB di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitas penyelenggaraan SPEB di lingkungan Pemda (Dengan Satuan: laporan)	2	39,665,000	0	0						0	0	0	0	0	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Dari tabel di atas dapat dilihat pada triwulan 1, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang mulai melaksanakan kegiatan pada belanja pegawai, belanja rutin, serta pelaksanaan Perjalanan Dinas sedangkan pelaksanaan kegiatan lainnya belum dilaksanakan karena adanya beberapa hal, yaitu :

1. Adanya tagging di beberapa kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, sehingga belum dapat dilaksanakan.
2. Adanya Pengunduran diri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sehingga menghambat kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.
3. Adanya beberapa masalah internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang yang dapat menghambat pencairan belanja Dinas Kounikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan merupakan bentuk analisa pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika KotaPangkalpinang. Hal ini dilakukan dengan menentukan indikator kinerja umum sebagai ukuran pencapaian kinerja yang telah di tuangkan dalam rencana strategis.

Hasil pencapaian target kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang. Pencapaian ini menjadi tolak ukur kemajuan yang telah dicapai. Dari capaian ini bisa menjadi dasar sebagai pertimbangan dalam menentukan target kinerja pada tahun-tahun mendatang. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		IndeksSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2.6	2.8	3	2.2	2.87	3.81	2.8	3
	Meningkatkan layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Persentase data dan informasi penyelenggaraan pemerintah yang dikomunikasikan/didesi minasikan dengan baik	Persen	100	100	100	100	NA	100	100	100
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan	Persentase layanan public yang diselenggarakan	Persen	100	100	100	NA	NA	100	100	100

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

	pemerintah Daerah yang efektif dan efisien	secara online terintegrasi										
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan layanan dan data statistik sektoral.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi	Persen	100	100	100	NA	NA	100	100	100	

Sebagaimana Tabel di atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang belum dapat diukur pada triwulan 1, karena belum bisa melakukan penilaian. Penilaian pencapaian Kinerja tersebut mulsi dilakukan pada triwulan III dan IV.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Tantangan (Threats)

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Perubahan ekonomi pasca-pandemi berdampak pada perencanaan dan penganggaran;
- Stabilitas keamanan nasional, penguatan ketahanan dan keamanan siber, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi;
- Tingkat literasi digital penyelenggaraan dan pemanfaatan TIK, keterbukaan informasi publik, keamanan informasi elektronik dan non elektronik serta satu data Indonesia yang masih rendah;
- Koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan system pemerintahan berbasis elektronik, serta system manajemen data statistik terintegrasi belum optimal.

b. Peluang (Opportunities)

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Regulasi /peraturan yang mengatur sistem pemerintahan berbasis elektronik, keterbukaan informasi public, pengelolaan informasi dan komunikasi, pola hubungan komunikasi sandi, satu data Indonesia;
- Tren Global dan Potensi Indonesia di Bidang Ekonomi Digital dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Peran dan tantangan TIK dalam pertumbuhan ekonomi. Distribusi

sektor informasi dan komunikasi dalam PDB cenderung mengalami peningkatan yang konsisten, Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0.;

- Standarisasi dan Sertifikasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

c. Kekuatan (Strengths)

Kekuatan adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kekuatan dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Masterplan Smart City Daerah Kota Pangkalpinang kota cerdas, rencana strategis dan anggaran pembangunan penyelenggaraan urusan pemerintahan komunikasi informasi, persandian dan statistic, regulasi /kebijakan penyelenggaraan dan pemanfaatan TIK;
- Kelembagaan dan aparatur sipil negara penyelenggaraan urusan pemerintahan komunikasi informasi, persandian dan statistic;
- Adaptasi kebiasaan baru, berupa kesadaran dan kebutuhan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan public pasca-pandemi
- Penyelenggaran pelayanan public, beberapa diantaranya sudah menggunakan system elektronik.
- kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan system pemerintahan berbasis elektronik, serta system manajemen data statistik terintegrasi belum optimal.

d. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kelemahan dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

- Penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik keterbukaan informasi publik, pengelolaan informasi dan komunikasi, layanan keamanan informasi elektronik dan non elektronik, ketersediaan data sesuai prinsip satu data Indonesia, berbagipakai data dan kemudahan akses data belum terintegrasi dan terfasilitasi dengan baik;
- Efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pada beberapa dimensi yang belum optimal;
- Budaya kerja birokrasi dan Tata kelola administrasi pemerintahan dan pelayanan public dalam penyelenggaraan pemerintahan yang belum baik;

- Manajemen kepegawaian dalam pengelolaan sumberdaya manusia aparatur yang menguasai keahlian dibidang digital belum optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang merupakan review terhadap program dan anggaran pada tahun 2025 yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Hal ini dilakukan dengan mempedomani Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan.

Review ini diiringi dengan penentuan target dari indikator program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dari target yang ditentukan terdapat jumlah pagu indikatif. Pagu indikatif ini dapat dibandingkan dengan kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh program dan kegiatan. Adapun Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.3.

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Tabel 2.3
RIVU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD-P 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PANGKALPINANG

Kode	Rancangan Awal RKPD		Kebutuhan Dana		Hasil Analisa Kebutuhan		Kebutuhan Dana	
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77,96	4.376.910.568,00	5.406.808.766,72	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77,96	4.376.910.568,00	5.406.808.766,72
		77				77		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	3.513.479.728,00	4.625.554.466,72	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	3.513.479.728,00	4.625.554.466,72
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33	3.513.479.728,00	4.625.554.466,72	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33	3.513.479.728,00	4.625.554.466,72
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	184.231.400,00	113.813.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	184.231.400,00	113.813.400,00
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	2.995.300,00	1.497.300,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	2.995.300,00	1.497.300,00
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	24.636.400,00	18.666.400,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	24.636.400,00	18.666.400,00
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	2.999.700,00	2.999.700,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	2.999.700,00	2.999.700,00
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	360	3.600.000,00	3.600.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	360	3.600.000,00	3.600.000,00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	150.000.000,00	87.050.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	150.000.000,00	87.050.000,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	532.959.440,00	521.200.900,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	532.959.440,00	521.200.900,00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	165.000.000,00	165.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	165.000.000,00	165.000.000,00
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	7.000.000,00	7.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	7.000.000,00	7.000.000,00
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	360.959.440,00	349.200.900,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	360.959.440,00	349.200.900,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	146.240.000,00	146.240.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	146.240.000,00	146.240.000,00

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	-	40.250.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	-	40.250.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	98.920.000,00	58.670.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	98.920.000,00	58.670.000,00
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	47.320.000,00	47.320.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	47.320.000,00	47.320.000,00
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100	1.691.740.656,00	2.116.794.116,00	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100	1.691.740.656,00	2.116.794.116,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	1.691.740.656,00	2.116.794.116,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	1.691.740.656,00	2.116.794.116,00
2.16.02.2.01.07	Pelayanan Informasi Publik	10	300.980.088,00	284.883.548,00	Pelayanan Informasi Publik	10	300.980.088,00	284.883.548,00
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan Opini, dan Aspirasi Publik	10	54.546.696,00	50.696.696,00	Monitoring Informasi Kebijakan Opini, dan Aspirasi Publik	10	54.546.696,00	50.696.696,00
2.16.02.2.01.021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	140	1.286.213.872,00	1.781.213.872,00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	140	1.286.213.872,00	1.781.213.872,00
2.16.02.2.01.24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	0	50.000.000,00	-	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	0	50.000.000,00	-
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	100	3.560.208.896,00	3.454.730.500,00	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	100	3.560.208.896,00	3.454.730.500,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70	45.000.000,00	45.000.000,00	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70	45.000.000,00	45.000.000,00
2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	1	45.000.000,00	45.000.000,00	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	1	45.000.000,00	45.000.000,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50	3.515.208.896,00	3.409.730.500,00	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50	3.515.208.896,00	3.409.730.500,00
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2	39.665.000,00	34.665.000,00	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2	39.665.000,00	34.665.000,00
2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	1	528.251.856,00	438.720.000,00	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	1	528.251.856,00	438.720.000,00
2.16.03.2.02.18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	1	-	-	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	1	-	-

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	67	2.947.292.040,00	2.936.345.500,00	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	67	2.947.292.040,00	2.936.345.500,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	60	129.148.392,00	91.528.392,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	60	129.148.392,00	91.528.392,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	129.148.392,00	91.528.392,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	129.148.392,00	91.528.392,00
2.20.02.2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	100	115.828.392,00	84.328.392,00	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	100	115.828.392,00	84.328.392,00
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	3	13.320.000,00	7.200.000,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	3	13.320.000,00	7.200.000,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100	105.126.696,00	82.326.696,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100	105.126.696,00	82.326.696,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	34.605.000,00	34.605.000,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	34.605.000,00	34.605.000,00
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	14.605.000,00	14.605.000,00	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	14.605.000,00	14.605.000,00
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	20.000.000,00	20.000.000,00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	20.000.000,00	20.000.000,00
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	21	70.521.696,00	47.721.696,00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	21	70.521.696,00	47.721.696,00
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7	70.521.696,00	47.721.696,00	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7	70.521.696,00	47.721.696,00
TOTAL			9.863.135.208,00	11.152.188.470,72			9.863.135.208,00	11.152.188.470,72

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Penelaahan usulan program dan kegiatan dilaksanakan dengan menentukan program, kegiatan, indikator program dan pagu indikatif dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Anggaran Perubahan tahun 2025. Pagu indikatif usulan program 2025 ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan alokasi dana yang dibutuhkan pada tahun 2025.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan prioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan informatika dalam Renstra tahun 2019-2024 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi. Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2019-2024 antara lain sebagai berikut :

1. Masih tingginya kesenjangan digital wilayah Indonesia
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pita lebar (Palapa Ring)
4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat versus kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan
5. Interlokalisasi dan krisis kepribadian bangsa

Sedangkan tantangan dan potensi program Universal Service obligation (USO) yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain:

- 1) Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
- 2) Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU;
- 3) Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian;
- 4) Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan.

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi focus pembangunan bidang komunikasi dan informatika yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika anatara lain :

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman ;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian focus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2019-2024 disusun dengan 4 (empat) fokus utama, yaitu :

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik

3.2. Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan startegi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah.

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat daerah beserta indicator kinerjanya disajikan dalam table 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
					Tahun 2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Permenpan No.5 Tahun 2018	Indeks	NA	2,6	2,8	3
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintah Daerah yang efektif dan efisien	Persentase Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah yang dikomunikasikan/didesiminasikan dengan baik	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo terkait penyampaian data dan informasi penyelenggaraan tahun berkenaan/jumlah kegiatan terkait penyampaian data dan informasi yang direncanakan dalam renja tahun berkenaan x 100%	Persen	NA	100	100	100
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintah Daerah yang efektif dan efisien	Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online trintegrasi	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan system IT dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan public/jumlah perangkat daerah x 100%	Persen	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan layanan dan data statistic sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi	Jumlah Perangkat daerah yang telah mengumpulkan, mengupdate dan memanfaatkan website data statistic daerah terpadu (https://data.pangkalpinang.go.id)dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi dibagi jumlah perangkat perangkat daerah dikali 100%.	Persen	100	100	100	100

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan bentuk perwujudan dari strategi dan kebijakan yang telah ditentukan. Rencana Kerja 2025 mengarahkan program dan kegiatan dalam bentuk sebagai berikut :

- Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju terlampir dalam Tabel 3.2.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

[illegible]

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Report Date

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

[illegible]

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah merupakan bentuk perencanaan untuk mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Pangkalpinang pada belanja yang dianggarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang pada tahun 2025. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah disusun dalam Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 terlampir dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN														
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PANGKALPINANG														
TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026														
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi Kegiatan	Hasil Progres		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Setelah Perubahan	Prakiraan Maju (2026)	Keterangan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			SKPD	Jenis Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13,00	(14)	(15)
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Pangkalpinang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:NILAI)	77,96			Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:NILAI)	77,96	5.406.808.766,72	4.690.816.028,00		
					Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:NILAI)	77			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:NILAI)	77				
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Pangkalpinang	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100			Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	4.625.554.466,72	3.938.115.799,00		
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Pangkalpinang			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	33	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	33	4.625.554.466,72	3.938.115.799,00		

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Pangkalpinang	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100			Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	113.813.400,00	243.279.480,00	-	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Pangkalpinang			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1.497.300,00	5.303.000,00		
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Pangkalpinang			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	18.666.400,00	43.000.580,00		
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Pangkalpinang			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	2.999.700,00	16.375.900,00		

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Pangkalpinang			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	360	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	360	3.600.000,00	3.600.000,00		
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	87.050.000,00	175.000.000,00		
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pangkalpinang	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:%)	100			Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:%)	100	521.200.900,00	373.513.624,00	-	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pangkalpinang			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan	1	165.000.000,00	192.180.000,00		

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

							Satuan:Lap oran)		Satuan:Lapora n)					
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Pangkalpinang			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	7.000.000,00	9.944.500,00		
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Pangkalpinang			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	349.200.900,00	171.389.124,00		
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pangkalpinang	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100			Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	146.240.000,00	135.907.125,00	-	

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Pangkalpinang		1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	40.250.000,00	61.682.000,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	2	58.670.000,00	59.947.000,00		
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pangkalpinang		1	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Dengan	1	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	47.320.000,00	14.278.125,00		

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

							Satuan:Unit)							
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Pangkalpinang	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	2.116.794.116,00	3.759.465.960,00		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pangkalpinang	Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi Komunikasi (STRAKDM) (Dengan Satuan:%)	100			Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi Komunikasi (STRAKDM)	100	2.116.794.116,00	3.759.465.960,00		

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

								(Dengan Satuan:%)					
2.16.02.2.01.07	Pelayanan Informasi Publik			Pangkalpinang		10	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Satuan: Permohonan)	10	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Satuan: Permohonan)	10	284.883.548,00	424.325.288,00	
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan Opini, dan Aspirasi Publik			Pangkalpinang		10	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Satuan: Rekomendasi)	10	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Satuan: Rekomendasi)	10	50.696.696,00	119.990.192,00	

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

2.16.02.2.01.021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Pangkalpinang		140	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Satuan: Media)	140	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Satuan: Media)	140	1.781.213.872,00	3.090.150.480,00		
2.16.02.2.01.24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			Pangkalpinang		0	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Satuan: Orang)	0	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Satuan: Orang)	0	-	125.000.000,00		
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			Pangkalpinang	Persentase Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:%)	100			Persentase Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:%)	100	3.454.730.500,00	4.469.897.751,00		

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pangkalpinang	Jumlah Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:PD/Unit Kerja)	70			Jumlah Unit Kerja (PD, UPTD, dan Kelurahan) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (Dengan Satuan:PD/Unit Kerja)	70	45.000.000,00	287.322.892,00		
2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa			Pangkalpinang		1	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Satuan: Dokumen)	1	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Satuan: Dokumen)	1	45.000.000,00	287.322.892,00		
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pangkalpinang	Persentase Layanan E-Government (Administrasi Pemerintahan dan Publik) yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Dengan Satuan:%)	50			Persentase Layanan E-Government (Administrasi Pemerintahan dan Publik) yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Dengan Satuan:%)	50	3.409.730.500,00	4.182.574.859,00		

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda					2	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Satuan: Laporan)	2	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Satuan: Laporan)	2	34.665.000,00	979.388.171,00		
2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah					1	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional (Satuan: Dokumen)	1	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional (Satuan: Dokumen)	1	438.720.000,00	653.686.888,00		
2.16.03.2.02.18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah					1	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan (Satuan: Dokumen)	1	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan (Satuan: Dokumen)	1	-	49.499.800,00		
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					67	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan	67	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah	67	2.936.345.500,00	2.500.000.000,00		

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

							Jaringan Intra Pemerinta h Daerah Kab/Kota (Satuan: Perangkat Daerah)		Daerah Kab/Kota (Satuan: Perangkat Daerah)					
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Pangkalpinang	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (Dengan Satuan:%)	60			Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (Dengan Satuan:%)	60	91.528.392,00	130.289.692,00	#REF!	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Pangkalpinang	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral sebagai Sarana Perencanaan dan Evaluasi (Dengan Satuan:%)	100			Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral sebagai Sarana Perencanaan dan Evaluasi (Dengan Satuan:%)	100	91.528.392,00	130.289.692,00	#REF!	
2.20.02.2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral			Pangkalpinang		100	Persentas e kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (Satuan: Persen)	100	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (Satuan: Persen)	100	84.328.392,00	115.289.942,00		

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia			Pangkalpinang		3	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Satuan: Dokumen)	3	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Satuan: Dokumen)	3	7.200.000,00	14.999.750,00		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			Pangkalpinang	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan (Dengan Satuan:%)	100			Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan (Dengan Satuan:%)	100	82.326.696,00	238.749.435,00		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pangkalpinang	Persentase sistem elektronik pemerintah daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) (Dengan Satuan:%)	100			Persentase sistem elektronik pemerintah daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) (Dengan Satuan:%)	100	34.605.000,00	161.353.035,00		

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pangkalpinang			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	14.605.000,00	25.355.000,00		
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			Pangkalpinang			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dengan Satuan:Laporan)	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dengan Satuan:Laporan)	1	20.000.000,00	135.998.035,00		
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			Pangkalpinang	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Jaringan Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:%)	21			Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Jaringan Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:%)	21	47.721.696,00	77.396.400,00		

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pangkalpinang			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	7	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	7	47.721.696,00	77.396.400,00		
TOTAL											11.152.188.470,72	13.289.218.866,00		



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025 masih mengacu kepada rencana Strategis 2024-2026, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Diharapkan dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja Perubahan ini dapat menjadi pemacu peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam mewujudkan *Good Governance* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang khususnya dan Pemerintah Kota Pangkalpinang pada umumnya. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pangkalpinang, Juni 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA PANGKALPINANG

SURANTO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I/IVb
NIP 197701292005011003